



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1909, 2016

KEMENDAGRI. Renja. Tahun 2017.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2017;
- b. bahwa perlu pedoman dalam rangka memberikan acuan bagi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran Tahun 2017 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam negeri tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 978);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-K/L, adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Renja Kementerian Dalam Negeri, adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Rencana Kerja Unit Organisasi, yang selanjutnya disebut Renja Unit Organisasi, adalah dokumen perencanaan Unit Organisasi Eselon I/Unit Organisasi Penanggung Jawab Program di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. Satuan Kerja Pusat adalah satuan kerja unit organisasi Eselon I/atau unit organisasi penanggung jawab pelaksanaan program yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.
8. Kepala Satuan Kerja Pusat adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.
9. Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Satuan Kerja UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri penanggungjawab pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DIPA Satuan Kerja.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri, yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.
12. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator Kinerja yang terukur.
13. Indikator Kinerja Program, yang selanjutnya disebut IKP adalah alat ukur untuk mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.

14. Kegiatan adalah merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon II/Satuan Kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur.
15. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disebut IKK, adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.
16. Target adalah satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja

Pasal 2

Renja-K/L Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Renja Kementerian Dalam Negeri; dan
- b. Renja Unit Organisasi.

Pasal 3

- (1) Renja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memuat:
 - a. Arah Kebijakan dan Strategi;
 - b. Program, IKP dan Target IKP;
 - c. Kegiatan, IKK, dan Target IKK; dan
 - d. Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan.
- (2) Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, memuat:

- a. Program, IKP dan Target IKP;
- b. Kegiatan, IKK dan Target IKK;
- c. Output dan Komponen; dan
- d. Alokasi Anggaran Program, Kegiatan, Output dan Komponen.

Pasal 5

- (1) Renja Kementerian Dalam Negeri dan Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dijabarkan lebih rinci dalam dokumen RKA-K/L.
- (2) Renja Kementerian Dalam Negeri dan Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang terdiri dari:
 - a. Satuan Kerja Pusat;
 - b. Satuan Kerja UPT; dan
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Satuan Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional;
 - b. Balai Pemerintahan Desa; dan
 - c. IPDN Kampus Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Pusat menyampaikan laporan pelaksanaan atas Renja Unit Organisasi kepada Menteri.
- (2) Kepala Satuan Kerja UPT dan Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja Pusat.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan RKP atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, Renja Kementerian Dalam Negeri dapat dilakukan penyesuaian.
- (2) Dalam hal adanya perubahan kebijakan Kementerian, Renja Unit Organisasi dapat dilakukan penyesuaian.
- (3) Penyesuaian Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak mengakibatkan

berkurangnya target IKP dan IKK dalam Renja Kementerian Dalam Negeri.

- (4) Kepala Satuan Kerja Pusat melaporkan penyesuaian Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat penyesuaian atas alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) huruf d, penyesuaiannya dilakukan melalui revisi RKA-K/L dan DIPA.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM
NEGERI TAHUN 2017

RENCANA KERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, diamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun Renja K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu kepada RKP tahunan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, disusun Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

A. MANDAT, TUGAS, DAN FUNGSI

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 8 ayat 3, ditegaskan bahwa dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan dari UUD 1945, Pasal 17 ayat (3), dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5, bahwa sebagai kementerian yang nomenklaturinya jelas disebutkan dalam UUD 1945, kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri.

Penjabaran lebih lanjut atas rincian tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri tersebut diatas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, ditegaskan bahwa Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah.
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri.
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menjalankan fungsi diatas, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh 11 (sebelas) Unit Kerja Eselon I, yaitu: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; (3) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; (4) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; (5) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; (6) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; (7) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; (8) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (9) Inspektorat Jenderal; (10) Badan Penelitian dan Pengembangan; (11) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta 5 (lima) Staf Ahli, masing-masing: (1) Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa; (2) Bidang Pemerintahan; (3) Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; (4) Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan (5) Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

Adapun pokok-pokok cakupan Tugas Kementerian Dalam Negeri yang melekat pada Unit-Unit Kerja Eselon I diatas meliputi:

1. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum; bidang pembinaan administrasi kewilayahan; bidang penyelenggaraan otonomi daerah; bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah; bidang pembinaan pemerintahan desa; bidang pembinaan keuangan daerah; serta bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
5. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan pokok-pokok cakupan Fungsi Kementerian Dalam Negeri yang melekat pada Unit-Unit Kerja Eselon I diatas meliputi:

1. koordinasi, penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan tugas, serta pemberian dukungan administrasi (mencakup rencana dan program; ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan, harmonisasi, advokasi, konsultasi, pendapat hukum dan bantuan hukum; serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaaan barang/jasa) lingkup Kementerian Dalam Negeri, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dan pemerintahan umum; bidang pembinaan administrasi kewilayahan; bidang penyelenggaraan otonomi daerah; bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah; bidang pembinaan pemerintahan desa; bidang pembinaan keuangan daerah; serta bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa; bidang pembinaan keuangan daerah; bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana administrasi kependudukan.
4. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; serta koordinasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan pengkajian kebijakan, serta pelaksanaan dan pengendalian penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
6. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, serta pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, serta pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pemerintahan dalam negeri.

Di samping itu, dalam hal pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi penyediaan aparatur pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang profesional dan berwawasan nasional. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan, bahwa di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibentuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, ruang lingkup tugas dan fungsi dari IPDN yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kepomongprajaan melalui sistem pendidikan tinggi kepomongprajaan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus, yang dilakukan dengan menerapkan kombinasi antara pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan. Pendidikan tinggi kepomongprajaan dimaksud meliputi Program Vokasi (D-IV), Program Akademik (S-1, S-2, dan S-3), serta Program Profesi Kepamongprajaan.

B. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019 dengan mengangkat Visi:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi diatas telah dirumuskan 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional atau Nawa Cita, meliputi:

1. menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. melakukan revolusi karakter bangsa.
9. memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian Agenda Prioritas Pembangunan Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 telah ditetapkan visi dan misi pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri, yaitu:

“KEMENTERIAN DALAM NEGERI MAMPU MENJADI POROS
JALANNYA PEMERINTAHAN DAN POLITIK DALAM NEGERI,
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK, MENEGAKKAN DEMOKRASI
DAN MENJAGA INTEGRASI BANGSA”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Kementerian Dalam Negeri, meliputi:

1. memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kebhinnekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-

daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), serta pencapaian Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

1. menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
 - a. penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - b. penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan.
 - c. peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan.
 - d. pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - e. peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri.
2. memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:

- a. penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan.
 - b. peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - c. penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi.
 - d. peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar.
 - e. peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
3. meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi:
- a. percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah.
 - c. penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - d. peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
 - e. peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru.
 - f. peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/ keistimewaan daerah.
 - g. harmonisasi dan penataan Produk Hukum Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:
- a. mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/ Kota secara tepat waktu.

- b. mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu.
 - c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD.
 - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah.
 - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan.
 - f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD).
 - g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:
- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah.
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi:
- a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM.
 - b. Penerapan indikator utama SPM di daerah.
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 (enam) urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 (delapan) urusan pilihan.
 - d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan.

7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:
 - a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah.
 - b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah.
 - c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
 - d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa.
 - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa.
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa.
 - e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:
 - a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Pemanfaatan NIK, *database* kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan.

- d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan.
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur.
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi.
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan.
 - f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.

II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2017

A. PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Pemerintah telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, yaitu “Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah”. Tema tersebut diturunkan kedalam 4 (empat) aspek pendekatan pembangunan meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan, faktor pendorong dan kondisi perlu, yang selanjutnya dilaksanakan dalam 23 kelompok Tematik Prioritas Nasional RKP Tahun 2017.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 tersebut, dilakukan 3 (tiga) pendekatan pembangunan, yaitu Holistik-Tematik, Terintegrasi, dan Spasial. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pendekatan pembangunan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Holistik-Tematik, bahwa untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang,

Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah.

2. Integratif, bahwa pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).

3. Spasial, bahwa pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.

Berkenaan dengan 3 (tiga) pendekatan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 akan diikuti dengan kebijakan anggaran belanja pada setiap Kementerian/Lembaga tidak lagi berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow program* prioritas.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian target Prioritas Pembangunan Nasional Kabinet Kerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 tersebut di atas, terdapat penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri pada 17 Tematik Prioritas Nasional. Selanjutnya, Ke-17 Tematik Prioritas Nasional dimaksud diuraikan dalam bentuk sasaran kegiatan pada 12 Unit Kerja Eselon I Penanggung Jawab Program Kementerian Dalam Negeri, meliputi:

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon I Penanggung Jawab
1	2	3	4
1. Kedaulatan Pangan			
1.	Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	1. Evaluasi Raperda RTRW Provinsi terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
2. Kemaritiman dan Kelautan			
2.	Perundingan Penetapan Batas Laut, Penamaan	2. Pembakuan rupabumi (pulau)	Ditjen Administrasi Kewilayahan

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon I Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil	3. Penyusunan kebijakan bidang toponimi dan data wilayah	
3.	Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari	4. Evaluasi Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi sebagai acuan dalam penataan ruang laut dan zonasi pesisir	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
3. Revolusi Mental			
4.	Penegakkan Hukum dan Kelembagaan Politik	5. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengusutan khusus terhadap kasus terkait disiplin dan etik aparat Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Jenderal
		6. Penerapan Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
		7. Pembekalan penegakan Perda dan memelihara Trantibum Linmas bagi aparat Satpol PP/PPNS/SATLINMAS	
		8. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Ditjen Otonomi Daerah
		9. <i>Pilot Project</i> pembiayaan penyelenggaraan Pilkada yang efisien	Badan Penelitian dan Pengembangan
5.	Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa	10. Kampanye Nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
		11. Pelaksanaan pendidikan kebhinnekaan dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya lokal	
		12. Penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan dan penyediaan database serta pemutakhiran terkait pemetaan dan identifikasi nilai-nilai dasar (memperkuat harga diri, karakter, wawasan kebangsaan dan daya saing bangsa)	
		13. Pembentukan calon Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM) di daerah dari lulusan	Institut Pemerintahan Dalam Negeri

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon I Penanggung Jawab
1	2	3	4
		IPDN	
6.	Reformasi Birokrasi Pemerintahan	14. Penerapan Sistem <i>e-Budgeting</i> di daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah
		15. Perolehan opini WTP (Provinsi dan Kab/Kota)	
		16. Penerapan Sistem <i>e-Reporting</i>	Ditjen Bina Keuangan Daerah
		17. Penerapan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait bidang kesehatan, sosial, pendidikan, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum, serta perumahan dan kawasan permukiman yang efektif sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2014 beserta turunannya	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
		18. Diklat Pengembangan Kompetensi Aparatur Pelopor Revolusi Mental (APRM) dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemda yang menerapkan budaya pelayanan prima dan bebas KKN	Badan Pengembangan SDM
		19. Pemberian penghargaan <i>Leadership Award</i> kepada Kepala Daerah yang berhasil memajukan daerahnya	Badan Penelitian dan Pengembangan
7.	Daya Rekat Sosial Dalam Kemajemukan	20. Pemenuhan Akta Kelahiran untuk anak	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		21. Pengembangan sistem pengetahuan kewarganegaraan melalui pengembangan dan pemanfaatan media layanan yang memiliki jangkauan luas	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
8.	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa	22. Pemberian penghargaan <i>Innovative Government Award</i> kepada daerah yang berhasil melaksanakan inovasi	Badan Penelitian dan Pengembangan
4. Daerah Perbatasan			
9.	Peningkatan Kualitas Diplomasi, Kerja Sama Lintas	23. Pelaksanaan perundingan batas dan kerjasama wilayah negara (Sosial Ekonomi	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon I Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Batas Negara	Malaysia-Indonesia (Sosek-Malindo), <i>Joint Indonesia-Malaysia (JIM)</i> , <i>Joint Border Comitee (JBC) RI-PNG</i> , <i>Joint Border Comitee (JBC) RI-Timor Leste</i> dan Penguatan Sekber Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia)	
10.	Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras, Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan	24. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
5. Daerah Tertinggal			
11.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik	25. Pembangunan gudang logistik dan PUSDALOPS yang dialokasikan bagi daerah tertinggal, perbatasan, dan rawan bencana dalam rangka kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan bencana	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
		26. Percepatan penerapan PTSP Prima pada Kabupaten daerah tertinggal.	
		27. Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN pada Kabupaten Daerah tertinggal	
		28. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan pada daerah Otsus/Istimewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ditjen Otonomi Daerah
		29. Peningkatan kinerja Pemerintahan DOB	
		30. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur di bidang perencanaan anggaran daerah yang mendukung pelayanan dasar publik di daerah tertinggal	Ditjen Bina Keuangan Daerah
		31. Peningkatan pendapatan Daerah pada daerah tertinggal	
		32. Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah tertinggal yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar bidang Kesehatan, Sosial,	Ditjen Bina Pembangunan Daerah

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon I Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Pendidikan, Trantibum dan Linmas, Pekerjaan Umum, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		33. Diklat (Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Pemda) penyelenggaraan urusan pemerintahan desa bagi daerah tertinggal	Badan Pengembangan SDM
		34. Diklat (Pengembangan kompetensi SDM Aparatur) bidang fungsional dan teknis bagi daerah tertinggal	Badan Pengembangan SDM
12.	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa	35. <i>Pilot Project</i> replikasi model hasil inovasi daerah bidang pelayanan perizinan	Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Pelayanan Kesehatan			
13.	Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"	36. Penyusunan regulasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat oleh Daerah	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Bangsa
		37. Daerah yang belanja APBD-nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan kesehatan	Ditjen Bina Keuangan Daerah
14.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	38. Penerapan PPK-BLUD oleh SKPD/unit kerja SKPD	Ditjen Bina Keuangan Daerah
15.	Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	39. Integrasi kebijakan pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana (KKB) ke dalam RPJMD/RKPD di Daerah	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Bangsa
		40. Akses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan/atau sebagai dasar penerbitan dokumen serta penyediaan informasi untuk pelayanan publik	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pelayanan Pendidikan			
16.	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas	41. Penyerapan DAK Pendidikan (fisik) $\geq 60\%$ DAK dalam APBD sesuai dengan Juknis oleh Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah
8. Antar Kelompok Pendapatan			
17.	Perluasan pelayanan dasar	42. Daerah yang belanja APBD-nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang	Ditjen Bina Keuangan Daerah

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon I Penanggung Jawab
1	2	3	4
		diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, dan perumahan	
		43. Penerapan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan dan Sosial, Pendidikan, PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
		44. Penerapan pelayanan dasar sesuai dengan SPM subbidang Trantibum	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
		45. Penerapan pelayanan dasar sesuai dengan SPM subbidang pemadam kebakaran	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
18.	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial)	46. Implementasi sistem pengaduan distribusi beras subsidi (raskin/rastra)	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
9. Desa dan Kawasan Pedesaan			
19.	Pengawasan Implementasi Undang-Undang Desa Secara Sistematis, Konsisten dan Berkelanjutan	47. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan pengawalan dana desa	Inspektorat Jenderal
		48. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Desa	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
		49. Penyusunan peraturan mengenai penataan desa adat	
20.	Penguatan Pemerintahan Desa	50. Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa agar terampil dalam mendukung tata kelola Pemerintahan desa	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
		51. Sosialisasi dan pembinaan dalam penyusunan Perbup/Perwalkot Penetapan Kewenangan Desa	
		52. Pelatihan aparat desa agar terampil dalam tata kelola pemerintahan desa	
		53. Pembinaan dan Penerapan <i>one map policy</i> dalam tata kelola pemerintahan desa	
		54. Penyusunan Kebijakan terkait Penamaan dan kode desa	
		55. Pembinaan teknis (Bimtek)	

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon I Penanggung Jawab
1	2	3	4
		<p>dalam penyusunan produk hukum desa</p> <p>56. Pembinaan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa</p> <p>57. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan SPM di desa</p>	
		<p>58. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa</p> <p>59. Pelaksanaan NSPK penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat desa</p> <p>60. Pelaksanaan 10 Program PKK oleh kelembagaan PKK</p> <p>61. Kelembagaan Posyandu yang memiliki kemampuan pengelolaan pelayanan sosial dasar</p> <p>62. Pelaksanaan pembinaan pemerintah daerah Provinsi/kabupaten dalam penerapan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di desa</p> <p>63. Kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga</p> <p>64. Penerapan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan RAPBDesa secara partisipatif</p> <p>65. Pelatihan peningkatan pendayagunaan Lembaga Desa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba</p> <p>66. Implementasi Dana Desa dan RAPBDesa dengan Pola Detasering Pendampingan pada Provinsi <i>Pilot Project</i> Format Birokrasi Pemdes (Organisasi, PNS, Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan)</p>	<p>Ditjen Bina Pemerintahan Desa</p>

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon I Penanggung Jawab
1	2	3	4
		67. Pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		68. Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa yang berbasis aplikasi	
		69. Peningkatan sumber PADesa dan pendapatan desa lainnya	
		70. Pelatihan Aparatur Pemerintah Kab/Kota yang terampil untuk Melatih Aparatur kecamatan selaku pembina teknis Pemerintahan Desa	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
		71. Pelatihan Aparatur Pemerintah Pusat dan Provinsi yang terampil untuk melatih Aparatur Pemerintah Kab sebagai calon pelatih pada Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa	
		72. Pelatihan aparatur pemerintah daerah yang terampil dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	
		73. Pelatihan aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	
		74. Penyusunan standardisasi dan pedoman evaluasi perkembangan desa	
		75. Pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan desa	
		76. Penyediaan data desa yang terpublikasi secara online	
21.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi	77. Pembinaan Kabupaten/Kota dalam Penetapan produk hukum daerah dalam rangka penerapan NSPK dan SPM di desa	Ditjen Bina Pemerintahan Desa

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon I Penanggung Jawab
1	2	3	4
22.	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi	78. Pelatihan peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan BUMDes	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
10. Perumahan dan Permukiman			
23.	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi	79. Penerapan tarif <i>Full Cost Recovery</i> (FCR) oleh daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah
11. Kepastian dan Penegakan Hukum			
24.	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak atas Keadilan	80. Evaluasi Rancangan Perda dan hasil kajian pembatalan Perda dan Perkada terkait HAM yang diharmonisasi	Sekretariat Jenderal
		81. Pembatalan Perda dan Perkada yang bermasalah	Ditjen Otonomi Daerah
12. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi			
25.	Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik	82. Kemitraan pemerintah dengan Ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
		83. Kemitraan pemerintah dengan Ormas untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lain melalui kemitraan dengan Ormas	
		84. Kemitraan Ormas dengan lembaga non pemerintah (swasta, perguruan tinggi, sesama Ormas, dll) dan pengembangan forum pemberdayaan Ormas	
		85. Pendidikan politik bagi politisi perempuan	
		86. Penguatan Pokja Demokrasi	
		87. Penerapan pelaksanaan <i>best practice</i> pendidikan politik di daerah	

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon I Penanggung Jawab
1	2	3	4
		88. Penyelenggaraan ruang dialog di masyarakat terkait pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah	
		89. Penyelenggaraan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait ketahanan seni, budaya, kerukunan umat beragama dan kemasyarakatan	
		90. Penyelenggaraan forum dialog kewaspadaan nasional seluruh Indonesia	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
		91. Peningkatan kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial	
26.	Penguatan Lembaga Demokrasi	92. Pemberian bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas Parpol (amanat UU No. 2/2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2/2008 tentang Partai Politik)	Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
		93. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik	
27.	Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan	94. Penyusunan kebijakan dan produk hukum bidang kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara, serta pulau-pulau kecil terluar	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
13. Reformasi Birokrasi			
28.	Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan	95. Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
		96. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima di Daerah	
		97. Peningkatan kualitas kelembagaan, infrastruktur dan manajemen pelayanan melalui PTSP di Daerah	
		98. Peningkatan kualitas kelembagaan, infrastruktur dan manajemen pelayanan	

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon I Penanggung Jawab
1	2	3	4
		melalui PATEN di Daerah 99. Peningkatan jumlah Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD 100. Peningkatan jumlah Kab/Kota yang berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD 101. Peningkatan kapasitas Daerah Kab/Kota berkinerja sedang dan rendah 102. <i>Pilot project</i> model inovasi pelayanan Akta Kelahiran	Ditjen Otonomi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
		103. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Trantibum Linmas, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terkait pelayanan publik di daerah; dan NSPK Urusan Pemerintahan Daerah	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
29.	Peningkatan Disiplin & Pengawasan Kinerja & Administrasi Keuangan	104. Penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat Waktu 105. Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	Ditjen Bina Keuangan Daerah
30.	Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB	106. Sinergi pusat dan daerah dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan berdasarkan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah termasuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 107. Integrasi data dan informasi pembangunan daerah dalam SIPD 108. Sertifikasi kompetensi jabatan aparatur di Kementerian Dalam Negeri dan Pemda 109. Akreditasi Lembaga pengembangan sumber daya manusia Provinsi	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Badan Pengembangan SDM

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon I Penanggung Jawab
1	2	3	4
		110. Diklat (Pengembangan Kompetensi SDM) Aparatur Kementerian Dalam Negeri dan Pemda) di bidang Keuangan daerah, Pembangunan Daerah, otonomi daerah, kewilayahan, kepemimpinan, politik, pemerintahan umum, dan kependudukan	
14. Perkotaan			
31.	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana	111. Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
		112. Penyusunan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standarisasi pemadam kebakaran dan SDM Damkar.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
32.	Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik	113. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana dan kebakaran 114. Penerapan sistem pengendalian pengelolaan pemenuhan SPP untuk perwujudan Kota berkelanjutan.	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
33.	Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota	115. Penyusunan kebijakan dan produk hukum bidang perkotaan 116. Pembentukan kelembagaan dan perencanaan infrastruktur dasar sesuai dengan SPP di Kota otonom dan Kota baru publik 117. <i>Updating</i> basis data perkotaan 118. Penerapan mekanisme dan kelembagaan kerjasama di Kawasan perkotaan metropolitan 119. Evaluasi penataan perkotaan 120. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kota dan antar Kab/Kota baik dalam negeri dan luar negeri	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon I Penanggung Jawab
1	2	3	4
		<i>(sister city)</i>	
34.	Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK	121. Peningkatan kapasitas Pimpinan Daerah perkotaan dalam pengelolaan kota 122. Peningkatan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota (city branding)	Ditjen Otonomi Daerah
15. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)			
35.	Pengembangan Kawasan Industri/KEK	123. Pembatalan dan revisi Perda/Perkada yang menghambat investasi di 8 wilayah KEK 124. Evaluasi Raperda RDTR Kab/Kota di sekitar KEK	Ditjen Otonomi Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah
		125. Evaluasi Raperda RDTR Kab/Kota di sekitar Kawasan Industri	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
16. Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha			
36.	Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan	126. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima di Kab/Kota (peningkatan jenis perijinan yang dilimpahkan ke PTSP, penyederhanaan perijinan sesuai NSPK, kecepatan dan kualitas pelayanan serta peningkatan SDM pengelola PTSP)	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
37.	Pelaksanaan deregulasi dan Harmonisasi Regulasi Perijinan Pusat dan daerah	127. Deregulasi dan harmonisasi terhadap pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) oleh daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah
38.	Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi	128. Daerah yang melakukan kerjasama kepemilikan modal BUMD antara pemda dan pihak ketiga 129. Penyelesaian permasalahan aset investasi di daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah
17. Reformasi Fiskal			
39.	Peningkatan Kualitas Belanja Negara	130. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Belanja Hibah dan Bansos 131. Penerapan model transparansi pembinaan keuangan daerah untuk masukan revisi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan	Ditjen Bina Keuangan Daerah

No.	Tema/Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan	Unit Eselon I Penanggung Jawab
1	2	3	4
		Keuangan Daerah	
40.	Optimalisasi Penerimaan Negara	132. Proporsi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD	Ditjen Bina Keuangan Daerah

Selain penugasan sasaran kegiatan prioritas nasional dimaksud, dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 juga disusun sasaran kegiatan prioritas kementerian yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Terkait dengan sasaran kegiatan prioritas nasional dan prioritas kementerian Tahun 2017 tersebut diatas, diuraikan lebih lanjut target pencapaiannya dalam Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 pada 12 (dua belas) Program Kementerian Dalam Negeri, yang terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri;
2. Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
3. Program Bina Administrasi Kewilayahan;
4. Program Bina Otonomi Daerah;
5. Program Bina Pembangunan Daerah;
6. Program Bina Pemerintahan Desa;
7. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah;
8. Program Penataan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
9. Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri;
11. Program Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri; dan

12. Program Pendidikan Kepamongprajaan.

B. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Dalam rangka pendanaan pencapaian sasaran kegiatan baik prioritas nasional maupun prioritas kementerian Tahun 2017, ditetapkan rencana anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan penetapan Pagu, yaitu Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran.

1. Pagu Indikatif

Berdasarkan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No.0163/M.PPN/05/2016 dan No.S-378/MK.02/2016, tanggal 13 Mei 2016 perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga TA.2017, ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 sebesar Rp.4.105.612.526.000,-.

2. Pagu Anggaran TA.2017

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-549/MK.02/2016, tanggal 30 Juni 2016 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA.2017, ditetapkan Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 sebesar Rp.4.105.612.526.000,-. Total Pagu Anggaran tersebut, sama dengan total Pagu Indikatif yang ditetapkan melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

Dalam perkembangan proses penyusunan pendanaan sasaran kegiatan Tahun 2017 berdasarkan Pagu Anggaran, terdapat penyesuaian total Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017, meliputi:

a. Penyesuaian I

Berdasarkan surat Menteri Keuangan No.S-619/MK.02/2016 tanggal 25 Juli 2016, ditetapkan penyesuaian atas Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA.2017 berupa penambahan pagu sebesar Rp.250.000.000.000,-, sehingga

pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri semula sebesar Rp.4.105.612.526.000,- menjadi sebesar Rp.4.355.612.526.000,-. Penambahan Pagu Anggaran tersebut, dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

b. Penyesuaian II

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-635/MK.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016 perihal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA.2017, Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA.2017 mengalami penyesuaian (penghematan) dari semula sebesar Rp.4.355.612.526.000,- menjadi sebesar Rp.3.447.114.389.000,- atau mengalami pengurangan sebesar Rp.908.498.137.000,- (20,86%).

c. Penyesuaian III

Penyesuaian Pagu Anggaran ke-3 berupa penyesuaian atas komposisi Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri Per Program, dengan total Pagu tetap sebesar Rp.3.447.114.389.000,- sesuai Surat Menteri Keuangan tanggal 5 Agustus 2016 tersebut diatas.

Penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji (CPNS Lulusan Angkatan XXIII/Tahun 2016 dan Angkatan XXIV/Tahun 2017), serta pembiayaan mutasi penempatan/penugasan CPNS Lulusan IPDN Angkatan XXIII ke daerah. Total kebutuhan anggaran tersebut yaitu sebesar sebesar Rp.87.599.000.000,-, yang sebelumnya belum teralokasi dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017.

Adapun kebutuhan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pengangkatan CPNS dari Lulusan IPDN Tahun 2016 yang sesuai penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lulusan IPDN

tersebut akan diangkat menjadi CPNS dengan formasi Kementerian Dalam Negeri, dan akan langsung ditempatkan di daerah. Dan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 181 Tahun 2016, pada Diktum Kelima ditetapkan bahwa biaya dan penggajian Pegawai Negeri Sipil dari lulusan IPDN dibebankan pada DIPA Kementerian Dalam Negeri

Selanjutnya, penyesuaian atas komposisi Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri Per Program, dengan total Pagu tetap sebesar Rp.3.447.114.389.000,-, dituangkan dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3550/SJ tanggal tanggal 21 September 2016 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Ka.Bappenas.

d. Penyesuaian IV

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-881/MK.02/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA.2017, ditetapkan adanya penyesuaian atas Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 yang akan ditetapkan dalam Pagu Alokasi Anggaran. Penyesuaian tersebut berupa pengurangan pagu sebesar Rp.143.598.314.000,- dari total pagu sebesar Rp.3.447.114.389.000,- dalam Pagu Anggaran, sehingga Pagu Kementerian Dalam Negeri dalam Alokasi Anggaran menjadi sebesar Rp.3.303.516.075.000,-.

Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan tersebut diatas, dilakukan penyesuaian atas Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 berupa pengurangan pagu Program pada 11 (sebelas) Unit Kerja Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Di samping itu, dalam rangka penyelesaian program KTP-el untuk pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara memperoleh kartu identitas penduduk, dilakukan penyesuaian pagu berupa optimalisasi pagu Program pada 4 (empat) Unit Kerja Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan total pagu sebesar Rp.276.774.610.000,-. Selanjutnya, total pagu optimalisasi sebesar Rp.276.774.610.000,- tersebut direalokasi menjadi tambahan pagu Program pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan blanko KTP-el dan pembayaran kegiatan tahun 2016 yang diluncurkan tahun 2017.

3. Pagu Alokasi Anggaran

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-907/MK.02/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, ditetapkan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 sebesar Rp.3.303.516.075.000,-.

C. KOMPOSISI ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasarkan total Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 sebesar Rp.3.303.516.075.000,- tersebut diatas, rincian komposisinya sesuai klasifikasi sumber pendanaan, kelompok jenis belanja, dan pagu per kewenangan, diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan sumber pendanaan:

- a. Rupiah Murni sebesar Rp.3.232.545.232.000,-;
- b. Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.17.135.633.000,-.
- c. Rupiah Murni Pendamping Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.5.211.878.000,-; dan
- d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.48.623.332.000,-.

2. Berdasarkan kelompok jenis belanja:

a. Belanja Operasional sebesar Rp.1.220.295.145.000,- yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai (001) sebesar Rp.762.033.072.000,-; dan
- 2) Belanja Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran (002) Barang Operasional sebesar Rp.458.262.073.000,-.

b. Belanja Non Operasional sebesar Rp.2.083.220.930.000,- yang terdiri dari:

- 1) Belanja Barang sebesar Rp.1.953.917.957.000,-; dan
- 2) Belanja Modal sebesar Rp.129.302.973.000,-.

3. Pagu per Kewenangan

a. Kantor Pusat sebesar Rp.2.915.164.655.000,-;

b. Kantor Daerah (UPT) sebesar Rp.334.496.334.000,-;

c. Dekonsentrasi sebesar Rp.25.350.000.000,-; dan

d. Tugas Pembantuan sebesar Rp.28.505.086.000,-.

III. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA.2017 tersebut diatas, selanjutnya diuraikan secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 per Unit Kerja Eselon I dalam matriks sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
010. 01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri		365,244
001	Persentase Capaian Program Prioritas dan Kualitas Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri	100% Tercapai Program Prioritas LAPKIN Kategori A	
002	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Pengelolaan BMN	WTP	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
003	Tingkat Kepuasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri	100% Kepuasan Terhadap Pengelolaan SDM,	
		100% Kepuasan Terhadap Pelayanan Komunikasi Publik	
004	Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	70% (Kategori B)	
005	Penyediaan Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri yang Terintegrasi	45%	
006	Persentase Penyelesaian Produk Hukum dan Sengketa Hukum Kementerian Dalam Negeri	60% Penyelesaian Produk Hukum,	
		100% Penyelesaian Sengketa Hukum	
1214	Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum		8,000
001	Persentase Hasil Evaluasi Rancangan Perda dan Hasil Kajian Pembatalan Perda dan Perkada terkait HAM yang Diharmonisasi	100%	
002	Jumlah Laporan Terhadap Kajian Kebijakan Pusat dan Kebijakan Daerah	4 Laporan	
003	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri yang Masuk Prolegdagri	60 Ranc. Per-UU-an	
004	Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Hukum di Lembaga Peradilan dan Bantuan Hukum	4 Laporan	
005	Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	
1215	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia		20,195
001	Jumlah Dokumen Perencanaan ASN Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3 Dokumen	
002	Jumlah ASN Kementerian Dalam Negeri yang Mendapatkan Pelayanan dan Pembinaan Kepegawaian	2000 Orang	
003	Jumlah ASN Kementerian Dalam Negeri yang Mengikuti Penilaian Kompetensi Pegawai	1500 Orang	
004	Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
1216	Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi		6,000
001	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan yang Diselesaikan	4 Dokumen	
002	Jumlah SOP yang Dievaluasi, Dikembangkan, dan Diterapkan	175 SOP	
003	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	80% (Kategori B)	
004	Jumlah Dokumen Administrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang Difasilitasi untuk Diselesaikan	1.800 Dokumen	
005	Jumlah Orang yang Difasilitasi untuk Berkonsultasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	48.000 Orang	
006	Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	
1217	Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		8,000
001	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Anggaran Kementerian Dalam Negeri	4 Dokumen	
002	Persentase Capaian Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri	100% Tercapai Program Prioritas	
003	Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri	LAPKIN Kategori A	
004	Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	
1218	Kegiatan Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan, Rumah Tangga, Layanan Pengadaan, Pengamanan, serta Sarana dan Prasarana Perkantoran		88,334
001	Tingkat Kemudahan dan Keamanan Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan	85%	
002	Tingkat Keamanan ASN, Stakeholder serta Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	92%	
003	Persentase Penyelesaian Seluruh Paket Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang Diajukan	100%	
004	Dokumen Penyelenggaraan Rumah Tangga Sekretariat Jenderal	3 Dokumen	
005	Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai Kebutuhan yang Direncanakan	92%	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
006	Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	
007	Jumlah Bulan Layanan Operasional Kerja (Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langganan Daya dan Jasa) Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang Diselesaikan dengan Tepat Waktu	12 Bulan Layanan	
1219	Kegiatan Penataan Administrasi Kerja Sama		6,000
001	Jumlah Laporan Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Mitra Dalam dan Luar Negeri yang Terselesaikan	7 Laporan	
002	Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	
1220	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset		183,227
001	Opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri	WTP	
002	Jumlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait Penyelesaian Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	30 Surat Keputusan	
003	Tingkat Penyerapan DIPA Sekretariat Jenderal	80%	
004	Jumlah Kasus dan/atau TLHP Kerugian Negara Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang Terselesaikan	10 Kasus dan/atau TLHP	
005	Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	
006	Persentase Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	
1221	Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi		23,351
001	Jumlah Data dan Informasi Pokok Kementerian Dalam Negeri yang Dimanfaatkan	45 Data Informasi Pokok	
002	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi lingkup Kementerian Dalam Negeri yang Dikelola	17 Aplikasi	
003	Persentase Infrastruktur TIK Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang Operasional	85% Infrastruktur TIK	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
004	Jumlah Bulan Layanan Teleconference Pusat dan Daerah	12 Bulan Layanan	
005	Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	
006	Jumlah Bulan Layanan Pemeliharaan Perangkat TIK	12 Bulan Layanan	
1222	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pimpinan		14,138
001	Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Stakeholder Terhadap Pelayanan Ketatausahaan dan Pelaksanaan Koordinasi Tugas Pimpinan	85%	
002	Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Stakeholder Terhadap Penyelenggaraan Keprotokolan	85%	
003	Jumlah Materi Rapat, Materi Persidangan dan Materi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang Disiapkan	100 Materi	
004	Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	
005	Jumlah Bulan Layanan Operasional Ketatausahaan Pimpinan	12 Bulan Layanan	
1223	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan		8,000
001	Persentase Seluruh Pengaduan Masyarakat Baik Langsung maupun Tidak Langsung yang Ditindaklanjuti	100%	
002	Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Dalam Negeri Melalui Media	70%	
003	Jumlah Pemustaka yang Berkunjung ke Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri	960 Pemustaka	
004	Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	

2. Direktorat Jenderal Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
010. 03.11	Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		162,835
001	Jumlah peristiwa gangguan keamanan	≤ 20	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan SDA)		
002	Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA	≤ 5	
1231	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan		31,836
001	Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang organisasi kemasyarakatan	1 modul dan 2 Permendagri	
002	Jumlah daerah yang mendapat peningkatan kinerja pelayanan Pendaftaran, data base, sistem informasi, pengawasan, penyelesaian sengketa, monitoring dan evaluasi terhadap ormas dan ormas yang didirikan oleh warga negara asing	34 Provinsi	
003	Jumlah kemitraan pemerintah dengan ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	450 Ormas	
004	Jumlah ormas yang bermitra untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan / marjinal lain melalui kemitraan dengan ormas	100 Ormas	
005	Jumlah fasilitasi kemitraan ormas dengan lembaga non pemerintah (swasta, perguruan tinggi, sesama ormas, dll) dan pengembangan forum pemberdayaan ormas	20 LNP	
006	Jumlah ormas yang mendapatkan peningkatan kompetensi/kualitas melalui penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional serta pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong kemandirian dan akuntabilitas ormas	50 Ormas	
007	Penyusunan pengukuran kinerja ormas	1 dokumen	
008	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Lingkup Unit Kerja Eselon II	100%	
1232	Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri		33,325
001	Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik	1 UU dan 1 NA	
002	Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di	5 Forum	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	tingkat nasional dan daerah		
003	Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas	10 Parpol	
004	Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practice pendidikan politik	20 Provinsi	
005	Jumlah Pengembangan sistem pengetahuan kewarganegaraan melalui pengembangan dan pemanfaatan media layanan yang memiliki jangkauan luas	3 Topik	
006	Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan	6 Provinsi	
007	Jumlah penguatan Pokja Demokrasi	34 Provinsi	
008	Penyusunan gagasan DTF (Dana Abadi Demokrasi)	1 dokumen	
009	Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	
1233	Kegiatan Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		11,900
001	Jumlah kebijakan bidang ketahanan ekonomi, seni, sosial, budaya dan agama	1 Modul	
002	Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya lokal	7 Provinsi	
003	Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi forum pertemuan, rapat koordinasi terkait dengan isu kesenjangan ekonomi dan konflik perebutan SDA yang melibatkan pemerintah, CSO, dunia usaha dan media sosial dalam rangka Pembinaan Ketahanan Ekonomi dengan melibatkan lembaga terkait	7 Provinsi	
004	Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan	14 Forum	
005	Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1 nusantara expo dan forum	
006	Jumlah daerah yang terpetakan terkait dengan ketahanan sosial, seni dan budaya	23 Provinsi	
007	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi serta pemantauan bidang ketahanan ekonomi melalui SIM	7 Dokumen	
008	Persentase Penyelesaian Pelayanan	100%	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II		
1234	Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional		15,100
001	Jumlah penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang kewaspadaan nasional	3 Permendagri	
002	Jumlah daerah yang mendapatkan Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) seluruh Indonesia	34 Provinsi	
003	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah	34 Provinsi	
004	Jumlah daerah yang telah di petakan, Pemantauan dan Pelaporan situasi Daerah secara efektif dan teratur di 34 Provinsi	34 Provinsi	
005	Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial	34 Provinsi	
006	Jumlah Peningkatan layanan publik khususnya administrasi, Lembaga Asing dan orang asing	180 Rekomendasi	
007	Pengembangan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik	Operasionalisasi	
008	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	
1235	Kegiatan Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan		13,600
001	Jumlah Peraturan perundang- undangan dan pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	1 Permendagri 1 modul	
002	Jumlah daerah melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	34 Provinsi	
003	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa	7 Angkatan	
004	Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kewarganegaraan	34 Provinsi	
005	Jumlah fasilitasi kampanye Nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial	34 Provinsi, 34 K/L, 27 LPNK	
006	Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan tersedianya database serta pemutakhiran terkait pemetaan dan identifikasi nilai-nilai dasar (memperkuat harga diri, karakter,	34 Provinsi	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	wasbang dan daya saing bangsa)		
007	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	
1236	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum		57,074
001	Jumlah Dokumen Perencanaan, data dan informasi serta konsistensi pelaporan kinerja yang diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu.	16 Dokumen	
003	Jumlah dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Pol dan PUM	18 dokumen	
004	Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan urusan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	10 Dokumen	
005	Jumlah Penyelesaian Operasional kerumahtanggaan, perlengkapan dan Ketatausahaan Lingkup Ditjen Pol dan PUM	3 dokumen	
006	Persentase Pengadaan sarana dan/Prasarana non mengikat	100%	
007	Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta langganan daya & Jasa) yang tepat waktu	100%	

3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
010. 04.08	Program Bina Administrasi Kewilayahan		204,399
001	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	60% (Berkinerja Baik)	
002	Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah	60%	
003	Tertibnya penataan wilayah	50 Segmen	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	administrasi batas antar daerah		
004	Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat	5 Kesepakatan	
005	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal)	40%	
006	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal)	30%	
1237	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah		31,300
001	Jumlah Kabupaten daerah tertinggal yang melimpahkan kewenangan perijinan dan non perijinan melalui PATEN	20 Kab	
002	Jumlah kabupaten di daerah tertinggal yang dibina dalam percepatan penerapan menuju PTSP yang Prima	40 kab	
003	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima (Jenis Perijinan yang dilimpahkan ke PTSP, Penyederhanan Perijinan yang sesuai dengan NSPK, Kecepatan Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kapasitas SDM Perijinan)	51 Kab/Kota	
004	Jumlah daerah yang ditingkatkan kualitas kelembagaan, infrastruktur dan manajemen pelayanan melalui PTSP	10 Provinsi	
005	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan PATEN	50 Kab/Kota	
006	Jumlah daerah yang ditingkatkan kualitas kelembagaan, infrastruktur, dan manajemen pelayanan melalui PATEN	10 Provinsi	
007	Jumlah daerah/kota yang difasilitasi dalam operasionalisasi kelembagaan (peningkatan kapasitas) sekretariat kerjasama antar daerah	8 Daerah	
008	Jumlah Provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan kinerja Gubernur sebagai wakil pemerintah	33 Provinsi	
009	Jumlah rumusan kebijakan bidang peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan	6 Rumusan Kebijakan	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
010	Jumlah jenis dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 DK/TP	
1238	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara		30,500
001	Jumlah Daerah yang terfasilitasi sesuai Sistem Pengendalian Pengelolaan Pemenuhan SPP untuk perwujudan Kota Berkelanjutan	100 Kab/Kota	
002	Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang perkotaan	3 Rumusan Kebijakan	
003	Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Batas Negara serta pulau-pulau kecil terluar	2 Rumusan Kebijakan	
004	Jumlah kota otonom dan kota baru publik yang terfasilitasi dalam pembentukan kelembagaan dan perencanaan infrastruktur dasar sesuai SPP	8 Kota Sedang, 5 Kota Baru Publik	
005	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam kerjasama pembangunan antar kota dan antar kota/kab baik dalam negeri dan luar negeri (sister city)	14 Kab/Kota	
006	Jumlah pelaksanaan evaluasi penataan perkotaan	2 Dokumen	
007	Jumlah perundingan batas dan kerjasama wilayah negara RI-Malaysia (SOSEKNASMALINDO, JIM, JBC RI-PNG, JBC RI- RDTL dan SEKBER SOSEKMALINDO RI-MALAYSIA)	5 Kesepakatan	
008	Jumlah Provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (JIM, SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG, SEKBER SOSEKMALINDO RI-MALAYSIA)	6 Provinsi	
009	Jumlah keterlibatan K/L dalam berkontribusi dalam penyelesaian/penanganan permasalahan perundingan perbatasan negara	10 K/L	
010	Jumlah pertemuan antar K/L dalam menyiapkan materi dan instrumen perundingan perbatasan negara	10 Pertemuan	
011	Jumlah kawasan perkotaan Metropolitan yang diperkuat mekanisme dan kelembagaan kerjasama	7 Kawasan Perkotaan Metropolitan	
012	Jumlah kota yang terfasilitasi melalui pemantapan Teknis Updating Basis Data Informasi Perkotaan	7 Kawasan Perkotaan Metropolitan,	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
		10 Kota Sedang	
013	Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi daerah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pelayanan pemerintahan	12 Unit Sarpras	
014	Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengembangan kawasan	15 Daerah	
015	Jumlah daerah yang diasistensi dan mediasi dalam penyelesaian masalah pertanahan dan pemanfaatan kawasan	15 Daerah	
1239	Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat	Ketertiban dan	19,366
001	Penerapan Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah	34 Provinsi	
002	Penyusunan Inpres Penerapan Gerakan Aparat Menuju Indonesia ramah	1 Inpres	
003	Jumlah aparatur Satpol PP/PPNS/Satlinmas yang diberikan pembekalan sesuai nilai-nilai strategis revolusi mental dalam rangka penegakan Perda dan memelihara trantibum linmas	2.371 Orang	
004	Persentase daerah yang memberikan pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang Trantibum	40%	
005	Jumlah Rumusan Kebijakan bidang Pol PP dan PPNS, Satlinmas, dan HAM	2 Rumusan Kebijakan	
006	Persentase Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam aktivitas Internasional Civil Defence Organization, konvensi internasional dan penerapan HAM	100%	
007	Jumlah Kelembagaan, aparatur Satpol PP/PPNS/Satlinmas Kab/Kota yang dibina dalam meningkatkan citra positif, kedisiplinan dan menerapkan kode etik dalam penegakan Perda/Perkada	15 Provinsi	
008	Persentase kesiapsiagaan satgas entry/ transit/ daerah asal	100%	
1240	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		35,876
001	Jumlah gudang logistik dan Pusdalops yang dialokasikan bagi daerah tertinggal dan perbatasan, dan rawan bencana dalam rangka kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan bencana	20 Sarpras	
002	Persentase daerah yang memberikan	30%	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang Pemadam Kebakaran		
003	Jumlah aparaturnya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	1.000 Orang	
004	Jumlah daerah yang melaksanakan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	30 Daerah	
005	Jumlah rumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar	4 Rumusan Kebijakan	
006	Jumlah daerah yang mendapatkan asistensi dalam keadaan tanggap darurat dan pasca bencana	30 Daerah	
1241	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi		22,850
001	Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi dan data wilayah	35 Rumusan Kebijakan	
002	Jumlah pembakuan rupabumi (pulau)	250 Pulau	
003	Jumlah segmen batas antar daerah yang disepakati para pihak	50 Segmen	
004	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penegasan batas daerah dan pembakuan nama rupa bumi	23 Daerah	
005	Persentase pembakuan rupabumi unsur buatan dan warisan budaya	60%	
1242	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan		64,507
001	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja, RKP, RKA-K/L dan Petunjuk Operasional)	100%	
002	Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan aset, laporan kinerja serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	100%	
003	Persentase penyusunan pedoman/juknis dan rancangan peraturan serta dokumen ketatalaksanaan yang diselesaikan	100%	
004	Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian	100%	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
005	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	80%	
006	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	
007	Persentase Pembinaan Bidang Administrasi Kewilayahan di pusat dan daerah	100%	
008	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	

4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
010. 07.07	PEMBINAAN OTONOMI DAERAH		136,994
001	Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	60% daerah Provinsi yang berkinerja tinggi	
		50% daerah Kab/Kota yang berkinerja tinggi	
002	Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru	40% DOB yang berkinerja baik dari total jumlah DOB	
003	Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah	60% keberhasilan penerapan ketentuan/kebijakan Otsus/Keistimewaan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	
1258	Kegiatan Fasilitasi KDH, DPRD, Dan Hubungan Antar Lembaga		15,000
001	Jumlah pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	101 Daerah (7 Provinsi, 76 Kab dan 18 Kota)	
002	Jumlah Peraturan/Kebijakan tentang Pejabat Negara dan DPRD yang disusun	4 peraturan/kebijakan	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
003	Jumlah Kepala Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD	7 Gubernur dan Pimpinan DPRD, 47 Bupati dan Pimpinan DPRD, 13 Walikota serta pimpinan dan anggota DPRD	
004	Jumlah Asosiasi Daerah dan LKPJ yang dibina dan dimonitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7 asosiasi daerah dan 100 LKPJ	
1259	Kegiatan Penataan Daerah Otonom Dan Otonomi Khusus Dan DPOD		18,750
001	Presentase jumlah daerah otonom baru yang ditingkatkan kinerja pemerintahannya	40%	
002	Jumlah daerah otonomi khusus/istimewa yang ditingkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang otonomi khusus/istimewa	5 Provinsi	
003	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun terkait penataan daerah, otonomi khusus/istimewa dan DPOD	1 Rancangan Peraturan perundang- undangan	
004	Jumlah Dokumen rencana atau usulan Pembentukan DOB dan Implementasi kebijakan penataan daerah yang dievaluasi dan diverifikasi	54 dokumen usulan	
005	Jumlah Daerah yang disupervisi dan diasistensi dalam peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah otonomi khusus/daerah istimewa	5 Daerah	
006	Jumlah Daerah yang disupervisi dan diasistensi dalam pelaksanaan kebijakan penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa	18 DOB,4 daerah otsus, 1 daerah istimewa	
007	Jumlah Rekomendasi Kebijakan DPOD yang disusun	Tersusunnya 4 rekomendasi kebijakan DPOD	
008	Jumlah regulasi daerah yg diterbitkan dlm rangka pemantapan sistem tata kelola pemerintahan yg baik di Papua dan Papua Barat	Diterbitkannya 2 Perdasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat	
009	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat	2 Laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasinya program/kegiatan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
1261	Kegiatan Evaluasi Kinerja Daerah Dan Peningkatan Kapasitas		20,000
001	Jumlah daerah yang mendapat status berkinerja tinggi berdasarkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2017 dari total jumlah Provinsi (85%)	28 Provinsi	
002	Jumlah daerah yang mendapat status berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD 2017 dari total jumlah kota dan kabupaten (70%)	65 Kota dan 291 Kabupaten	
003	Presentase Jumlah Daerah Kab/Kota berkinerja sedang dan rendah yang ditingkatkan kapasitasnya	30% dari jumlah Kab/Kota yang berkinerja sedang	
1264	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah		14,000
001	Jumlah Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota (City Branding)	10 Kota Sedang	
002	Jumlah Pemimpin Daerah perkotaan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan kota	250 Pejabat Daerah di 93 Kota dan/atau Kabupaten yang memiliki kawasan perkotaan	
003	Jumlah Beban Kerja Urusan yang difasilitasi dan dikoordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Daerah dalam rangka Penataan kelembagaan Pemerintah	32 Beban Kerja Urusan	
004	Jumlah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang disusun terkait kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah	2 permendagri	
005	Jumlah Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi dalam penataan kelembagaan daerah, dan kepegawaian pada perangkat daerah	34 Provinsi	
006	Persentase Layanan Pengelolaan mutasi dan Administrasi Aparatur Sipil Negara di Daerah lintas Provinsi dan ke Pusat	100%	
007	Jumlah Daerah yang mendapat asistensi dan supervisi dalam penataan ketatalaksanaan kelembagaan dan kepegawaian pada perangkat daerah.	34 Provinsi	
008	Jumlah Daerah yang mendapat supervisi dan asistensi dalam penentuan jumlah jabatan fungsional dan Standar kompetensi.	34 Provinsi	
1265	Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis		55,944

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	Lainnya Ditjen Otonomi Daerah		
001	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun	3 Dokumen	
002	Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	
004	Persentase Penyediaan dan Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Ditjen Otonomi Daerah	100%	
005	Persentase penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang otonomi daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan	100%	
006	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional, dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	
3991	Kegiatan Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah		13,300
001	Persentase Perda/Perkada yang direvisi dan dibatalkan di 8 wilayah KEK	100% pembatalan Perda/Perkada	
002	Persentase pembatalan Perda dan Perkada yang bermasalah	100%	
003	Jumlah daerah yang mendapatkan sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi dalam penyusunan produk hukum daerah	34 Provinsi	
004	Persentase jumlah produk hukum daerah yang di register	100%	
005	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan kualitas produk hukum Daerah	100%	

5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
010. 06.06	Program Bina Pembangunan Daerah		198,428
001	Persentase konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	70%	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
002	Persentase / Jumlah daerah yang menyelenggarakan SIPD	22 Provinsi	
003	Persentase penyelesaian perselisihan antar susunan tingkat pemerintahan terkait dengan urusan pemerintahan	100%	
004	Persentase Penerapan indikator utama SPM di daerah	100%	
005	Persentase Penerapan NSPK di daerah	100%	
1251	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		15,282
001	Jumlah daerah yang mengimplementasikan sistem pengaduan distribusi beras subsidi (raskin/rastra)	34 Provinsi	
002	Jumlah NSPK (Urusan Tata Ruang, Pertanahan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Pangan) terkait pelayanan publik yang diterapkan di daerah	7 NSPK	
003	Jumlah evaluasi raperda RTRW Provinsi	9 Provinsi	
004	Jumlah evaluasi Raperda RZWP3K Provinsi	8 Provinsi	
005	Jumlah evaluasi Raperda RDTR Kab/Kota di sekitar KEK	8 RDTR	
006	Jumlah evaluasi Raperda RDTR Kab/Kota di sekitar Kawasan Industri	14 RDTR	
007	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkup UPD I	45%	
008	Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya lingkup Unit Kerja Eselon II	100%	
009	Jumlah regulasi lingkup Urusan Pemerintahan Daerah (UPD) I	3 Regulasi	
010	Jumlah pelaksanaan Rakernas BKPRN dan RAKORNAS BKPRD dalam rangka meningkatkan kualitas koordinasi kelembagaan penataan ruang	2 Kegiatan	
011	Jumlah daerah yang menyusun Perda RTRW Provinsi/Kab-kota dan Perda RRTR	55 Kab/Kota	
012	Cakupan pembinaan umum (fasilitasi dan konsultasi, sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap urusan pemerintahan lingkup UPD I	7 Urusan	
1252	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan		14,017

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	Urusan Pemerintahan Daerah III		
001	Jumlah daerah yang menerapkan indikator Standar pelayanan minimal (SPM) terkait urusan kesehatan, sosial, dan trantibumlinmas yang efektif sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 beserta turunannya	34 Provinsi	
002	Jumlah daerah yang menyusun regulasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat	17 Provinsi	
003	Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah tertinggal yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar urusan Kesehatan, Sosial dan Urusan Pemdagri (Trantibum Linmas)	40 Daerah Tertinggal	
004	Jumlah daerah yang menerapkan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan dan sosial	40 Kab	
005	Jumlah SPM (Urusan Sosial, Kesehatan, dan Trantibum Linmas), dan NSPK (Urusan Budaya, Pariwisata, Catatan Sipil, Industri, Perdagangan, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang diterapkan di Daerah	11 SPM/NSPK	
006	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkup UPD III	45%	
007	Cakupan pembinaan umum (fasilitasi dan Konsultasi, Sosialisasi, Koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap urusan pemerintahan lingkup UPD III	11 Urusan	
008	Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya lingkup Unit Kerja Eselon II	100%	
009	Jumlah regulasi lingkup Urusan Pemerintahan Daerah (UPD) III	1 Regulasi	
1253	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II		34,513
001	Jumlah daerah yang menerapkan indikator Standar pelayanan minimal (SPM) terkait urusan pekerjaan umum dan perumahan dan permukiman yang efektif sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 beserta turunannya	34 Provinsi	
002	Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah tertinggal yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	40 Daerah Tertinggal	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
003	Jumlah daerah yang menerapkan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman	40 Kab	
004	Jumlah SPM (Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman) dan NSPK (Urusan Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Komunikasi dan Informatika, Statistika, dan Persandian) terkait pelayanan publik yang diterapkan di daerah	7 SPM/NSPK	
005	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam pengelolaan sumber daya air	18 Provinsi	
006	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkup UPD II	45%	
007	Cakupan pembinaan umum (fasilitasi dan konsultasi, sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap urusan pemerintahan lingkup UPD II	7 Urusan	
008	Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya lingkup Unit Kerja Eselon II	100%	
009	Jumlah regulasi lingkup Urusan Pemerintahan Daerah (UPD) II	1 Regulasi	
1254	Kegiatan Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah		19,868
001	Jumlah daerah yang sinergi dalam penyusunan rencana pembangunan berdasarkan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah termasuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	34 Provinsi	
002	Jumlah daerah dengan data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dalam SIPD	30 Provinsi	
003	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pusat dan Daerah dalam Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	40%	
004	Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	100%	
005	Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya lingkup Unit Kerja Eselon II	100%	
006	Jumlah peraturan/kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan	3 Regulasi	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	daerah dan perencanaan pembangunan daerah		
1255	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV		12,408
001	Jumlah daerah yang menerapkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait urusan pendidikan yang efektif sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 beserta turunannya	34 Provinsi	
002	Jumlah daerah yang mengntegrasikan kebijakan KKB ke dalam RPJMD/RKPD	17 Provinsi	
003	Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah tertinggal yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar urusan pendidikan	40 Daerah Tertinggal	
004	Jumlah daerah yang menerapkan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang pendidikan	40 Kab	
005	Jumlah SPM (Urusan Pendidikan) dan NSPK (Urusan Pendidikan, Pengendalian Kependudukan dan KB, Pemuda dan Olahraga, Kearsipan, Perpustakaan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) terkait pelayanan publik yang diterapkan	9 SPM/NSPK	
006	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkup UPD IV	45%	
007	Cakupan pembinaan umum (fasilitasi dan konsultasi, sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap urusan pemerintahan lingkup UPD IV	8 Urusan	
008	Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya lingkup Unit Kerja Eselon II	100%	
1256	Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		102,340
001	Persentase Dukungan Tugas Teknis dan Fungsional Pembangunan Daerah	100%	
002	Persentase Penyelesaian Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Ditjen Bina Bangda	100%	
003	Persentase Penyelesaian Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan	100%	
004	Persentase Dukungan Pelayanan Administrasi, serta Tugas Teknis dan Fungsional Lainnya pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah	100%	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
005	Persentase Fasilitasi Data dan Informasi, Sistem dan Prosedur Lingkup Ditjen Bina Bangda	100%	
006	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur di Lingkungan Ditjen Bina Bangda	100%	
007	Persentase fasilitasi Penyusunan Program Legislasi, Advokasi, serta Dokumentasi dan Informasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Ditjen Bina Bangda	100%	
008	Persentase Dukungan Sarana Prasarana pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah	100%	
009	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (01 dan 02) yang Tepat Waktu	100%	

6. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/ IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
010.0 5.13	Program Bina Pemerintahan Desa		229,559
001	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	7094 Desa	
002	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa	7094 Desa	
1243	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional		34,408
001	Jumlah Kumulatif Aparat Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan	270 Orang	
002	Persentase Pelayanan Urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Administrasi Umum, Perpustakaan, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Termasuk Pembayaran Gaji Pegawai	100%	
003	Persentase Dukungan Peningkatan Kapasitas, Penyusunan Program dan Anggaran, serta Monitoring dan Evaluasi	100%	
004	Jumlah Kumulatif Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam Mendukung	1510 Orang	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/ IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	Tata Kelola Pemerintahan		
1244	Kegiatan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa		11,000
001	Jumlah Provinsi yang membina desa dalam mendukung <i>one map policy</i> serta tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas	2 Provinsi	
002	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam Melaksanakan Penamaan dan Kode Desa/Kelurahan	20 Kab/Kota	
003	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam penyusunan produk hukum desa	20 Kab/Kota	
004	Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang dibina dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	20 Kab/Kota	
005	Jumlah Provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan SPM desa	33 Provinsi	
006	Jumlah Kab/Kota yang menetapkan produk hukum daerah terkait penerapan NSPK SPM Desa	25 Kab/Kota	
007	Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Desa PNS yang diterbitkan	1 Peraturan	
008	Jumlah Peraturan Mengenai Penataan Desa Adat yang diterbitkan	1 Peraturan	
009	Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang diberikan Sosialisasi dan Pembinaan dalam Penyusunan Perbup/Perwalkot Penetapan Kewenangan Desa	150 Kab/Kota	
1246	Kegiatan Kelembagaan dan Kerjasama Desa		15,000
001	Jumlah Posyandu yang memiliki kemampuan pengelolaan pelayanan sosial dasar	225 Posyandu	
002	Jumlah Provinsi/Kab yang di Fasilitasi Dalam Rangka Pembinaan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa serta Perlindungan Masyarakat Desa	33 Provinsi dan 66 Kab/Kota	
003	Jumlah BPD di 150 Desa di 33 Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa	150 Desa di 33 Provinsi	
004	Jumlah desa di 3 Provinsi, 6 Kabupaten yang melaksanakan NSPK penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat desa	60 Desa di 3 Provinsi dari 6 Kab	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/ IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
005	Jumlah kelembagaan PKK di 200 Desa di 3 Provinsi yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan 10 Program PKK	200 PKK di 3 Provinsi (Banten, NTT, Kepri)	
006	Jumlah kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga	50 Kerjasama di 25 Desa	
007	Jumlah Desa Penyelenggara Penerapan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan RAPBDesa secara partisipatif di 3 Provinsi (Maluku, Sumbar dan Jateng)	40 Desa	
008	Jumlah aparatur desa yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan BUMDes	250 Aparatur Desa	
009	Jumlah desa lokasi Pilot di 2 Provinsi yang diberikan upaya pendayagunaan Lembaga Desa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba	2 Provinsi 200 orang	
1247	Kegiatan Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa		11,000
001	Jumlah Provinsi Pilot Project Format Birokrasi Pemdes (Organisasi, PNS, Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan) untuk Implementasi Dana Desa dan RAPBDesa yang dilaksanakan dengan Pola Detasering Pendampingan	5 Provinsi	
002	Jumlah desa di 15 kab/kota, 3 Provinsi (Sumut, Jateng, Maluku) yang telah mengelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa	60 Desa pada 15 Kab/Kota, di 3 Provinsi	
003	Jumlah desa di 10 kab/kota, 5 Provinsi yang telah mengelola aset desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan Aset desa	50 Desa	
004	Jumlah desa di 25 kabupaten, 3 Provinsi yang mampu meningkatkan Sumber PADesa dan Pendapatan Desa Lainnya	60 Desa	
005	Jumlah Desa di 5 Provinsi dan 210 Kab/Kota yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa yang berbasis aplikasi	200 Desa	
1248	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa		25,000
004	Jumlah Aparatur Pemerintah Pusat dan Provinsi yang terampil melatih Aparatur Pemerintah Kabupaten sebagai calon pelatih pada pelatihan Pembina Teknis Pemerintah Desa	100 orang	
005	Jumlah Aparatur Pemerintah Kab/Kota yang terampil untuk Melatih Aparatur Kecamatan selaku Pembina	437 orang	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/ IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	Teknis Pemerintah Desa		
006	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang terampil dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	100 orang	
007	Jumlah aparatur pemerintah kecamatan yang terampil dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1763 Orang	
1249	Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa		12,000
001	Jumlah Dokumen Standard dan Pedoman Evaluasi	1 Dokumen	
002	Jumlah desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya	1500 Desa	
003	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki ketersediaan data yang terpublikasi secara online	18% Desa	
1250	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pemerintah Desa		121,151
001	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang Direncanakan	4 Dokumen	
002	Jumlah laporan Data dan Informasi serta Monitoring dan Evaluasi Program/kegiatan di pusat dan daerah sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2 Laporan	
003	Jumlah Laporan Penyelesaian Standar Sistem dan Prosedur, Reformasi Birokrasi, dan Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa	3 Laporan	
004	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang Tepat Waktu	100%	
006	Jumlah Laporan Keuangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Administrasi dan Keuangan Serta Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	4 Laporan	
007	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Sekretariat Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%	
008	Persentase Data Aset Barang Milik Negara (BMN) Sesuai Dengan Standar	100%	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/ IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
009	Persentase Pembinaan Kepegawaian	100%	
010	Jumlah Laporan penyelesaian peraturan perundang-undangan sesuai standar	3 Laporan	

7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
010. 09.09	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah		90,122
001	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 Provinsi; 275 Kab/Kota	
002	Jumlah Provinsi/kab/kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 Provinsi; 275 Kab/Kota	
003	Persentase Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD	64%	
004	Jumlah daerah yang menyerap ($\geq 90\%$) Dak dalam APBD sesuai Juknis	150 Daerah	
005	Jumlah Pemda yang Menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual	24 Provinsi; 300 Kab/kota	
006	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, dan perumahan	110 daerah (Provinsi dan Kab/Kota)	
007	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan Kesehatan	7 Provinsi, 120 Kab/Kota	
1274	Kegiatan Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah		9,508
001	Jumlah Daerah Tertinggal yang mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan anggaran Daerah yang mendukung pelayanan dasar publik	40 Daerah Tertinggal	
002	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi /Kab/Kota yang tepat Waktu	305 Daerah	
003	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan	127 Daerah	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan kesehatan		
004	Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, dan perumahan	110 Daerah	
005	Jumlah Daerah yang telah menerapkan Sistem E-Budgeting	2 Provinsi	
006	Jumlah Pemerintah Daerah yang Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Belanja Hibah dan Bansos.	300 daerah	
007	Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	3 Permendagri, 68 Kepmendagri (71 Peraturan)	
008	Jumlah ketersediaan data dan informasi Perencanaan Anggaran Daerah	34 Provinsi	
009	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya lingkup Unit Kerja Eselon II	100%	
1275	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah		6,753
001	Jumlah Daerah Tertinggal yang Meningkatkan Pendapatan Daerahnya	28 Kab yang terentaskan; dan 26 Kab Tertinggal Lainnya	
002	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi dan harmonisasi terhadap pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	100 Daerah	
003	Persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD	64%	
004	Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Pendapatan Daerah	3 Permendagri	
005	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	
1276	Kegiatan Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah		7,035
001	Jumlah Daerah yang Menyerap DAK Pendidikan (fisik) $\geq 60\%$ DAK dalam APBD sesuai dengan Juknis	150 Daerah	
002	Model Transparansi Pembinaan Keuangan Daerah untuk Masukan Revisi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	5 Daerah (3 Provinsi; 2 Kab/Kota)	
003	Jumlah Kebijakan/regulasi/Pedoman	1 Perpres, 2	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	di Bidang Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	Permendagri	
004	Jumlah daerah yang menyelesaikan permasalahan penggunaan dana perimbangan dan pinjaman daerah	158 Daerah	
005	Jumlah daerah yang menyerap ($\geq 90\%$) DAK dalam APBD sesuai dengan juknis	150 Daerah	
006	Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dana transfer di tingkat Provinsi dan Kab/Kota	4 Dokumen	
007	Monitoring dan evaluasi terhadap dana otsus	3 Provinsi	
008	Jumlah ketersediaan Data dan Informasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	34 Provinsi	
009	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	
1277	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah		11,025
001	Jumlah Provinsi/kab/Kota yang menetapkan Perda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 Provinsi; 275 Kab/Kota	
002	Jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP (Provinsi dan Kab/Kota)	25 Provinsi; 250 Kab/Kota	
003	Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	2 Permendagri, 34 Kepmendagri (36 Peraturan)	
004	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah	435 Daerah	
005	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	24 Provinsi dan 300 Kab/Kota	
006	Jumlah ketersediaan data dan informasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan monitoring pelaksanaan anggaran Daerah (TEPRA)	34 Provinsi	
007	Jumlah Daerah yang menganggarkan dana pilkada serentak Tahun 2017	171 Daerah	
008	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	
1278	Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Lainnya Ditjen Bina Keuangan Daerah	Dukungan Teknis	46,213
001	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	
002	Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil	100%	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP		
003	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Aset sesuai SIMAK BMN	100%	
004	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	
005	Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%	
006	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	
007	Persentase Penyelesaian Dukungan Data Keuangan Daerah	100%	
5313	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BUMD, BLUD Dan Barang Milik Daerah		9,588
001	Jumlah SKPD/unit kerja SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD	500 SKPD	
002	Jumlah daerah yang menerapkan tarif Full Cost Recovery (FCR)	60 Daerah	
003	Jumlah daerah yang menerapkan Sistem E-Reporting	4 Provinsi; dan 2 Kab/Kota	
004	Jumlah Daerah yang melakukan kerjasama kepemilikan modal BUMD antara Pemda dan pihak ketiga.	13 Provinsi	
005	Jumlah daerah yang difasilitasi untuk penyelesaian permasalahan aset terkait investasi	3 Provinsi	
006	Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD	4 Permendagri	
007	Persentase penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap rencana pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam APBD	64%	
008	Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam rangka tertib pengelolaan BMD	34 Provinsi	
009	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II	100%	

8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
010. 08.10	Program Penataan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		999,474
001	Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota	
002	Meningkatkan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat	30 K/L (Kumulatif)	
003	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota	514 Kab/Kota	
004	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	7 Provinsi 76 Kab dan 18 Kota	
1267	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		462,510
001	Jumlah Kab/Kota dalam pengelolaan KTP-el berbasis NIK dengan perekaman sidik jari	514 Kab/Kota	
002	Jumlah Kab/Kota yang database kependudukan yang tersambung (<i>online</i>) dengan Provinsi dan Nasional	514 Kab/Kota	
003	Terpenuhinya Sarpras SIAK di daerah dan data center kependudukan	514 Kab/Kota	
1268	Kegiatan Pengelolaan Informasi Kependudukan		18,450
001	Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional secara <i>online</i>	514 Kab/Kota	
002	Jumlah daerah yang terfasilitasi bimbingan teknis pendampingan teknis dan sosialisasi pelaksanaan Sistem informasi Administrasi kependudukan	514 Kab/Kota	
003	Jumlah Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan informasi kependudukan	3 Laporan	
004	Persentase Penyelesaian, Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya lingkup Unit Kerja Eselon II	100%	
1269	Kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil		5,500

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
001	Jumlah Kebijakan/Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Sipil	1 Pedoman	
002	Jumlah Daerah yang mendapatkan bintek, advokasi dan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pencatatan sipil	514 Kab/Kota	
003	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Dokumentasi Kebijakan Pencatatan Sipil	3 Laporan	
004	Persentase Penyelesaian, Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya lingkup Unit Kerja Eselon II	100%	
005	Jumlah Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun	79%	
1270	Kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk		380,198
001	Jumlah Kebijakan/Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	1 Rancangan Pedoman / Juknis	
002	Jumlah Daerah yang mendapatkan bintek, advokasi dan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pendaftaran penduduk	34 Provinsi	
003	Terpenuhinya Blangko KTP-el untuk daerah	25.999.872 Keping	
004	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Dokumentasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	
005	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya lingkup Unt Kerja Eselon II	100%	
1271	Kegiatan Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5,900
001	Jumlah Kebijakan/Pedoman/Juknis Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Rancangan Kumulatif	
002	Jumlah Daerah Bintek, Sosialisasi Kebijakan Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	
003	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Dokumentasi Kebijakan Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Laporan	
004	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya lingkup Unt Kerja Eselon II	100%	
1272	Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		13,225
001	Jumlah kebijakan/Pedoman Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	1 RPP	
002	Pemanfaatan Data dan Dokumen	2 Laporan	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	Kependudukan		
003	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Dokumentasi Kebijakan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	3 Laporan	
004	Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik	30 K/L (Kumulatif)	
005	Pengendalian dan Pengamanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	3 Laporan	
006	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya lingkup Unt Kerja Eselon II	100%	
1273	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil		113,691
001	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	3 Dokumen	
002	Dokumen/Pedoman/Juknis, Rancangan Peraturan Perundangan dan Surat Keputusan Lingkup Ditjen Dukcapil	2 Dokumen	
003	Jumlah Layanan Informasi Kependudukan melalui Media Cetak dan Media Elektronik	3 Jenis Media	
004	Jumlah Laporan penyelesaian hasil monev dan laporan keuangan dan asset, laporan kinerja, serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	5 Laporan	
005	Jumlah Dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan serta Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Dukcapil	2 Dokumen	
006	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas lainnya	100%	
007	Persentase pengadaan sarpras sesuai kebutuhan	2 Laporan	
008	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu	12 Bulan Layanan	
009	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja dengan Rencana Kerja Tahunan	3 Laporan	

9. Inspektorat Jenderal

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
010. 02.03	Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		71,181
001	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri	B (75%) - Baik	
002	Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah	B (75%) - Baik	
003	Nilai Penegakan Integritas	B (75%) - Baik	
1225	Kegiatan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I		2,927
001	Jumlah unit kerja yang dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat I	6 unit kerja	
002	Jumlah unit kerja yang dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat I	6 unit kerja	
1226	Kegiatan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II		2,355
001	Jumlah unit kerja yang dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat II	7 unit kerja	
002	Jumlah unit kerja yang dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat II	7 unit kerja	
1227	Kegiatan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat III		5,250
001	Jumlah Provinsi yang dilakukan pengawasan terhadap dana desa dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat III	18 Provinsi	
002	Tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat III	80%	
1228	Kegiatan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat IV		5,250
001	Jumlah Provinsi yang dilakukan pengawasan terhadap dana desa dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat IV	16 Provinsi	
002	Tingkat efektivitas pendampingan dan	80%	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	konsultasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat IV		
1229	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Lainnya Inspektorat Jenderal	Dukungan Teknis	51,849
001	Persentase penyelesaian dokumen RKA-K/L	100%	
002	Persentase penyelesaian dokumen LAKIN	100%	
003	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan Itjen	100%	
004	Persentase penyelesaian dokumen analisis dan evaluasi hasil pengawasan Itjen	100%	
005	Persentase pengelolaan dokumen administrasi keuangan Itjen	100%	
006	Persentase pengelolaan dokumen administrasi umum Itjen	100%	
007	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	100%	
008	Persentase terpenuhinya Belanja Operasional	100%	
1230	Kegiatan Penegakan Integritas, Pengusutan Khusus Kementerian dan Pemerintahan Daerah	Pemeriksaan dan Dalam Negeri Dan	3,550
001	Persentase pemeriksaan dan pengusutan khusus terhadap kasus terkait disiplin dan etik aparat Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta penyelenggara Pemerintahan Daerah	80%	
002	Tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi pengawasan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta penyelenggara Pemerintahan Daerah	80%	

10. Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
010. 11.04	Program Penelitian dan Pengembangan		54,770
001	Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri	75%	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
002	Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah	8 Provinsi	
003	Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah	1 Permendagri	
1280	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah		3,041
001	Jumlah Laporan dari hasil Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah	4 Laporan	
002	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil Kelitbangan Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	12 Rekomendasi	
004	Jumlah Daerah Pilot Project Pembiayaan Penyelenggaraan pilkada yang efisien	4 Daerah	
1281	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum		3,330
001	Jumlah Pembinaan kelitbangan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Bidang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum	4 Laporan	
002	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelitbangan Puslitbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum yang diseminarkan, publikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	10 Rekomendasi	
004	Jumlah Kepala Daerah yang mendapatkan penghargaan dalam memajukan daerahnya	15 Provinsi	
1282	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2,900
001	Jumlah Pembinaan Kelitbangan (asisten, koordinasi, fasilitasi, NSPK Kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan	4 Laporan	
002	Jumlah rekomendasi perumusan	11 Rekomendasi	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
	kebijakan hasil Kelitbang Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan yang diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan		
003	Pilot Project model inovasi pelayanan Akta Kelahiran	3 Kab, 3 Kota di 3 Provinsi	
1283	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur		3,921
001	Jumlah Daerah (Provinsi/kab/kota) yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah	8 Provinsi	
002	Jumlah daerah Penerima Penghargaan <i>Innovative Government Award</i> (IGA)	3 Provinsi, 10 Kab, dan 10 Kota	
003	Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah	1 Permendagri	
004	Jumlah Pembinaan kelitbang (asisten, koordinasi, fasilitasi, NSPK Kelitbang, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Inovasi Daerah	4 Laporan	
005	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbang Puslitbang Inovasi Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	5 Rekomendasi	
006	Jumlah Daerah Tertinggal yang memperoleh Replikasi Model Hasil inovasi Daerah Bidang Pelayanan Perizinan	2 Daerah Tertinggal	
1284	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri		41,578
001	Persentase Penyelesaian dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Evaluasi Kinerja serta Kelitbang, Hukum dan Perundang-undangan	100%	
002	Persentase penyelesaian Administrasi Ketatausahaan Pimpinan, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan, serta Pengelolaan Perpustakaan Informasi dan Dokumentasi	100%	
003	Persentase administrasi verifikasi, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	
004	Persentase penyelesaian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem Prosedure	100%	
005	Persentase penguatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah	100%	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
006	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	
007	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%	

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
010. 12.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		223,446
001	Peningkatan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda Melalui Pengembangan Kapasitas SDM	40%	
002	Rasio Hari Pengembangan Kapasitas SDM Terhadap Hari Kerja	2%	
003	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur Pemdagri (Indikator antara lain : Widyaiswara, Sarpras, Modul/ Instrumen, Materi, dan lain-lain)	B	
1285	Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi		6,281
001	Jumlah Aparatur Kemendagri dan Pemda Yang Tersertifikasi	4 Komponen, 2 Provinsi	
002	Jumlah Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Terakreditasi	15 Provinsi	
003	Jumlah Naskah Standarisasi dan Sertifikasi	6 Naskah	
004	Jumlah Laporan terkait pembinaan, pemantauan dan evaluasi lingkup standardisasi dan sertifikasi	5 Laporan	
005	Manajemen Aset, Rumah Tangga, Administrasi dan Umum	1 Layanan	
006	Jumlah Angkatan yang Mengikuti Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Pembelajaran	24 Angkatan	
1287	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri		9,632
001	Jumlah Naskah Kebijakan Teknis, dan Rencana Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	3 Naskah	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
002	Jumlah Angkatan Yang Mengikuti Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan Sumber Daya Manusia	25 Angkatan	
003	Jumlah Laporan terkait pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan SDM pemerintahan dalam negeri	5 Laporan	
004	Manajemen Aset, Rumah Tangga, Administrasi dan Umum	1 Layanan	
005	Jumlah Angkatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemda Penyelenggara Urusan Pemerintahan Desa Dari Daerah Tertinggal	5 Angkatan	
006	Jumlah Angkatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemerintahan Daerah di Bidang KEUDA, BANGDA, OTDA, Kewilayahan, Kepemimpinan, Politik, Pemerintahan Umum dan Kependudukan	29 Angkatan	
1288	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan		13,793
001	Jumlah Naskah Terkait Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan	3 Naskah	
002	Jumlah Laporan Terkait Dukungan Pengembangan Kompetensi Revolusi Mental	3 Laporan	
003	Pemberian Bantuan Aparatur Kemendagri yang Memperoleh Bantuan Pendidikan Pasca Sarjana	12 Orang	
004	Jumlah Angkatan Diklat Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Prajabatan dan Kepemimpinan	38 Angkatan	
005	Jumlah Angkatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemda Penyelenggara Urusan Pemerintahan Desa Dari Daerah Tertinggal	10 Angkatan	
006	Jumlah Laporan Terkait Koordinasi Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	1 Laporan	
007	Manajemen Aset, Rumah Tangga, Administrasi dan Umum	1 Layanan	
008	Jumlah Laporan terkait pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan SDM pemerintahan dalam negeri	5 Laporan	
1289	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis		10,553
001	Jumlah Angkatan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Dari Daerah Tertinggal	19 Angkatan	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
002	Jumlah Naskah Terkait Kebijakan Teknis, Dan Rencana Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional Dan Teknis	4 Naskah	
003	Jumlah Angkatan Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	52 Angkatan	
004	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional Binaan Kemendagri	10 Dokumen	
005	Jumlah Pelaporan Pembentukan Jabatan Fungsional Baru Binaan Kemendagri	2 Laporan	
006	Jumlah Laporan Yang Terkait Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Fungsional dan Teknis	5 Laporan	
007	Manajemen Aset, Rumah Tangga, Administrasi dan Umum	1 Layanan	
1290	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Regional		105,469
001	Jumlah Angkatan Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemda Penyelenggara Urusan Pemerintahan Desa dari Daerah Tertinggal Lingkup Regional	4 Angkatan	
002	Jumlah Angkatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda di Bidang Keuda, Bangda, Otda, Kewilayahan, Kepemimpinan, Politik, PUM, dan Kependudukan Lingkup Regional	4 Angkatan	
003	Jumlah Angkatan Pengembangan Kompetensi Yang Memuat Materi Revolusi Mental dan Kepemimpinan Lingkup Regional	4 Angkatan	
004	Jumlah Angkatan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis dari daerah tertinggal di lingkup Regional	9 angkatan	
005	Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemdagri di Regional	77 Angkatan	
006	Pelaksanaan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan SDM Regional	12 Laporan	
007	Layanan Administrasi Keuangan, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan Regional	4 Dokumen	
008	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemendagri Regional	100%	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
009	Pengelolaan Aset, Rumah Tangga, Administrasi Umum Regional	100%	
011	Rehabilitasi Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Regional Makassar	100%	
013	Layanan Perkantoran	12 bulan	
1291	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		77,718
001	Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Dukungan Manajemen Teknologi Informasi BPSDM	100%	
002	Dukungan Manajemen Eselon I	100%	
003	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	

12. Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
010. 01.12	Program Pendidikan Kepamongprajaan		567,062
001	Program Studi yang Terakreditasi	A	
002	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental (D4 dan S1)	70%	
003	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental (S2)	19%	
004	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental (S3)	14%	
005	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental (Profesi)	12%	
006	Persentase tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja Alumni	75%	
007	Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional yang terakreditasi	15 Hasil Penelitian	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
008	Jumlah hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional yang terakreditasi	4 Hasil Pengabdian Masyarakat	
1292	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi, Akademik, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan		54,726
001	Kenaikan rata rata nilai IPK (pengajaran, pelatihan) Program Vokasi (D4, S1, S2, S3 dan Program Profesi Kepamongprajaan)	0,03(D-IV), 0,05 (S-1), 0,17 (S-2), 0,05 (S-3), 0,04 (Profesi)	
002	Jumlah Kelembagaan IPDN yang meningkat nilai Akreditasi	3 Lembaga	
003	Jumlah Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM) sebagai Calon Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM)	5.144 Praja	
004	Jumlah Pengabdian Masyarakat yang terpublikasi pada jurnal kepomongprajaan	40 Pengabdian Masyarakat	
005	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas	4 Dokumen	
006	Persentase Pemanfaatan media informasi elektronik dalam mendukung proses pembelajaran praja IPDN	85%	
007	Jumlah kerjasama dengan K/L, Pemda dan PTN/PTS Dalam Negeri dan Luar Negeri	12 Kerjasama	
008	Jumlah Hasil Kajian dan Penelitian yang terpublikasi pada jurnal kepomongprajaan	44 hasil Kajian dan Penelitian	
1293	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan		32,313
001	Persentase penurunan pelanggaran disiplin sedang dan berat dari seluruh praja IPDN	10%	
002	Jumlah penghargaan ekstrakurikuler praja pada tingkat Nasional	7 penghargaan	
003	Jumlah Bulan Layanan Penyelenggaraan Keprajaan yang baik dan tepat waktu	12 Bulan Layanan	
004	Jumlah Provinsi yang disurvei dengan survey Indek kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja Alumni IPDN	20 Provinsi (K)	
1294	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan		285,404
001	Jumlah bulan layanan administrasi umum dan keuangan yang tepat waktu	12 Bulan Layanan	

Kode	Program/IKP/kegiatan/IKK	Target IKP/IKK	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
1	2	3	4
002	Jumlah tenaga kependidikan yang diikutsertakan dalam diklat jabatan fungsional khusus (JFK) dan Jumlah dosen yang diikutsertakan dalam diklat jabatan fungsional khusus (JFK)	25 Tenaga Kependidikan, 150 Dosen Tersertifikasi	
003	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu	100%	
1295	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah		194,618
001	Peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan, pengasuhan) program diploma	0,06 (Dari IPK Tahun Sebelumnya)	
002	Jumlah Pengabdian Masyarakat yang terpublikasi pada jurnal kepamongprajaan	6 Pengabdian Masyarakat	
003	Jumlah Bulan Layanan Penyelenggaraan Keprajaan yang baik dan tepat waktu	12 Bulan Layanan	
004	Persentase penurunan pelanggaran disiplin sedang dan berat dari seluruh praja IPDN	10%	
005	Jumlah penghargaan ekstrakurikuler Praja pada tingkat Nasional	12 Penghargaan	
006	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas	28 Dokumen	
007	Persentase Pemanfaatan media informasi elektronik dalam mendukung proses pembelajaran praja IPDN	85%	
008	Jumlah Hasil Kajian dan Penelitian yang terpublikasi pada jurnal kepamongprajaan	12 hasil Kajian dan Penelitian	
009	Layanan administrasi umum dan keuangan yang tepat waktu	100%	
010	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan	100%	
011	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu	100%	

IV. PENUTUP

Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 merupakan acuan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan Renja tersebut masing-masing Satuan Kerja mempedomani prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta melaporkan pencapaiannya secara periodik dan berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO